

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus terhadap keabsahan pembentukan panitia hak angket DPRD Kabupaten Jember. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui keabsahan pembentukan panitia hak angket Kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan menelaah semua perundang-undangan terkait isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan konseptual (conceptual approach) pandangan dari para doktrin dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi, dan pendekatan historis dalam kerangka pelacakan lembaga hukum. Hasil penelitian bahwa pembentukan panitia hak angket DPRD Kabupaten Jember sesuai dengan prosedur, namun tidak memenuhi mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Kata Kunci : Hak Angket, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Jember.

ABSTRACT

This study focuses on the legitimacy of the committee of inquiry rights of the regional people's representative council (DPRD) of Jember Regency. The purpose of this research is to find out the validity of the formation of the Jember Regency Inquiry Rights Committee based on Law Number 2 of 2018 concerning the People's Consultative Assembly (MPR), House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD), and Regional People's Representative Assembly (DPRD). The method used is a statutory approach by examining all legislation related to legal issues being handled, a conceptual approach the views of doctrines in solving legal issues faced, and a historical approach within the framework of tracking legal institutions. The results showed that the formation of the committee of inquiry rights of the regional people's representative council (DPRD) of Jember Regency was in accordance with the procedure, but did not fulfil the mechanism regulated in the laws and regulations, especially the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2018 concerning Guidelines for Compiling the Order of the Provincial, Regency and City Regional House of Representatives.

Keywords : *Right of Inquiry, Regional People's Representative Assembly, Jember Regency*